

Metode FIFO untuk Analisis Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Web di Desa Jatitujuh

Harya Gusdevi¹, Hijaj La Baika²

^{1,2} Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung, Bandung, Indonesia

Email: ¹deviharya@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: deviharya@gmail.com

Abstrak—Dalam Undang-Undang, mengamanatkan pembuatan sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 mengatakan bahwa administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (Indonesia). Masalah yang ada adalah ketika melayani masyarakat mengenai pembuatan surat masih menggunakan cara konvensional. Dimana masyarakat yang akan melakukan pengajuan pembuatan surat harus mendatangi rumah RT setempat untuk meminta surat pengantar, oleh karena itu permasalahan yang sering terjadi yaitu pihak RT tidak sepenuhnya ada dirumah, sehingga masyarakat tidak dapat langsung mengajukan pembuatan surat dikarenakan harus menunggu surat pengantar dari RT terlebih dahulu. Metode yang digunakan dalam analisis system ini menggunakan Metode First In First Out (FIFO)

Kata Kunci: Website; FIFO; Pelayanan Administrasi; Desa; Analisis.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Hukum and Suryadarma, 2018).

Kebijakan mengenai administrasi kependudukan ini didasarkan kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang merupakan dimulainya babak baru kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia. Dalam Undang-Undang, mengamanatkan pembuatan sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional. Dimana, dalam pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa dapat pelayanan yang memuaskan. Kependudukan (Cristianingsih, 2018).

Desa Jatitujuh merupakan salah satu desa yang terletak di jalan kibagus rangin no. 01 kecamatan Jatitujuh kabupaten Majalengka provinsi Jawa Barat. Penulis telah melakukan wawancara dan observasi dengan kepala desa Jatitujuh, tercatat desa Jatitujuh untuk saat ini memiliki 7 blok dan terdapat 23 RT. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan kepala desa Jatitujuh menyatakan bahwa pada saat ini masyarakat yang ada pada desa Jatitujuh yang akan melakukan proses pembuatan surat harus di antar oleh RT setempat. Hal itu dikarena sebagai bentuk kepala desa melihat kinerja ketua RT dalam melayani warganya, dan juga sebagai mana bentuk warga menghargai terhadap adanya RT.

Masalah yang ada pada desa Jatitujuh berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Jatitujuh yaitu dalam melayani masyarakat akan pembuatan surat masih menggunakan cara konvensional. Dimana masyarakat yang akan melakukan pengajuan pembuatan surat harus mendatangi rumah RT setempat untuk meminta surat pengantar, oleh karena itu permasalahan yang sering terjadi yaitu pihak RT tidak sepenuhnya ada dirumah, sehingga masyarakat tidak dapat langsung mengajukan pembuatan surat dikarenakan harus menunggu surat pengantar dari RT terlebih dahulu.

Oleh karena itu penulis mempunyai gagasan untuk membuat sistem administrasi surat pelayanan kependudukan dengan menggunakan metode First in First out (FIFO) guna mempermudah dan mempercepat dalam pelayanan administrasi bagi pengurusan surat di kantor desa, serta warga bisa dengan mudah dalam mengurus pembuatan surat dengan melakukan pengisian permohonan surat melalui website secara online.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Jatitujuh. Desa tersebut berlokasi di Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sampel untuk dijadikan Responden yang diberikan kuesioner

terhadap analisis Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Web di Desa Jatitujuh nantinya ada 102 orang. 102 orang tersebut terdiri dari Kepala Desa Staf Desa, RT dan Masyarakat Desa Jatitujuh.

2.2 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan menggunakan Metode First In First Out (FIFO). Metode FIFO didasarkan suatu asumsi yang menyatakan bahwa barang yang diterima dahulu dikeluarkan terlebih dahulu (Kusnadi, 2012). Implementasi algoritma FIFO pada sistem yang di analisis yaitu terdapat pada saat proses pengajuan surat dimana nantinya masyarakat yang mengajukan terlebih dahulu, maka itu yang akan diproses pembuatannya terlebih dahulu. Dimana FIFO ini merupakan sebuah sistem yang dapat membantu dalam proses antrian dan sangat cocok dipakai pada proses pelayanan administrasi dalam pengajuan pembuatan surat, dimana nantinya pihak staff desa tidak perlu memilih mana pengajuan yang akan di proses terlebih dahulu, karena pengajuan sudah diurutkan berdasarkan waktu, jadi pihak staff desa bisa melayani dari urutan yang paling atas terlebih dahulu.

Kelebihan metode First In First Out (FIFO) yakni nilai persediaan akhir di neraca akan mendekati biaya pengganti. Kelebihan lainnya adalah laba yang dihasilkan menggambarkan arus fisik persediaan (Goenawan dan Susantolie, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Sistem

a. Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi tentang proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga berisikan tentang informasi-informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Berikut merupakan tabel kebutuhan fungsional pada pembuatan sistem pelayanan administrasi kependudukan pada Desa Jatitujuh.

Tabel 1. Analisis Kebutuhan Fungsional

User Story	Functional Requirement & Priorities			
	High Priority	Medium Priority	Low Priority	No Priority
Masyarakat yang sulit mengajukan pembuatan surat dikarenakan untuk melakukan pembuatan surat harus ada surat pengantar dari ketua RT setempat, dan ketua RT tidak sepenuhnya ada dirumah.	1. Sistem dapat menampilkan menu pilihan pengajuan surat 2. Sistem dapat mengelola data yang merupakan persyaratan untuk melakukan pengajuan surat pengantar SKCK, surat keterangan domisili, surat izin usaha, surat pengantar KTP, surat kelahiran, Surat izin pernikahan 3. Sistem dapat melakukan Acc terhadap masyarakat yang mengajukan surat 4. Sistem dapat melakukan mencetak dan mengirim surat yang diajukan. 5. Sistem dapat mengisi form biodata	1. Sistem dapat mengirim notifikasi apabila pengajuan telah di ACC 2. Sistem dapat merekap laporan bulanan 3. Sistem dapat mengelola data user 4. Sistem dapat menampilkan surat selesai	1. Sistem dapat mengirim notifikasi apa bila pengajuan ditolak. 2. Sistem dapat melakukan upload file.	1. Sistem dapat mengunduh atau mendownload surat

b. Analisis Kebutuhan Non-fungsional

Berikut merupakan tabel kebutuhan non-fungsional pada analisis sistem pelayanan administrasi kependudukan pada Desa Jatitujuh.

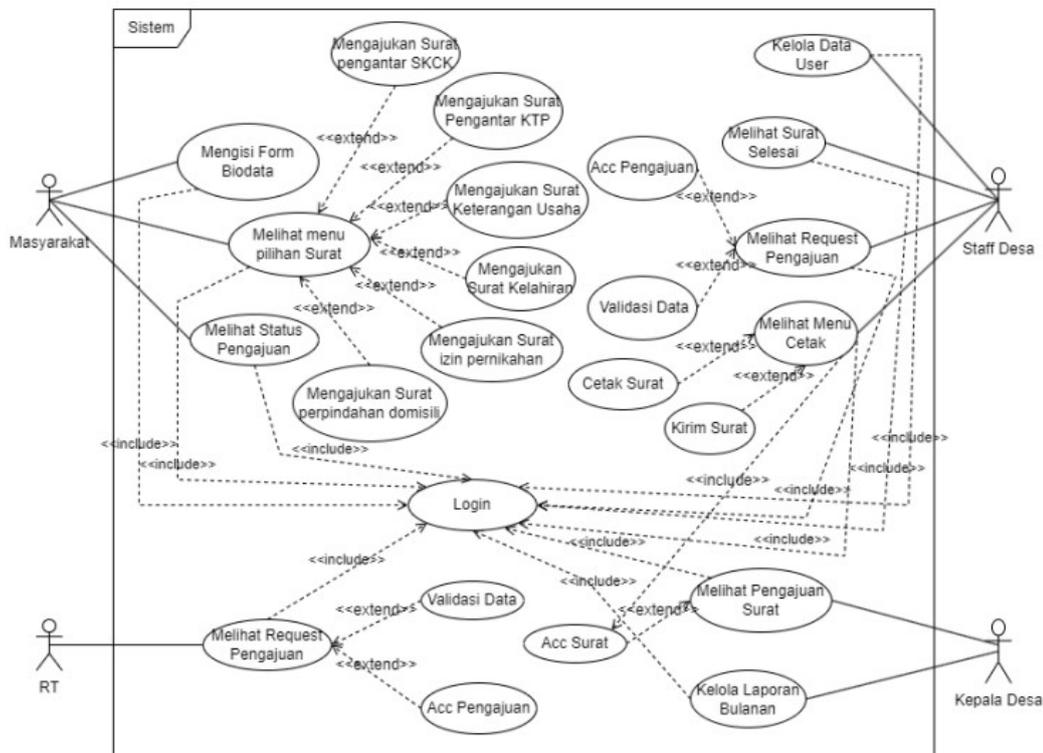
Tabel 2. Analisis Kebutuhan Non-fungsional

No	Attribut	Kebutuhan	Ruang Lingkup
1	Availability (Ketersediaan)	Sistem dapat diakses oleh semua pengguna smartphone atau PC yang mempunyai Web Browser.	Sistem dapat diakses selama 24 jam, dan untuk pengajuan surat hanya tersedia pada hari senin sampai jumat.
2	Interoperability (Kemudahan Antarmuka)	Tampilan sistem yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna.	Tampilan sistem didesain menggunakan CSS dan framework bootstrap.
3	Usability (Kemudahan pengguna)	Tampilan sistem yang sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem.	Tampilan sistem yang dilengkapi dengan berbagai jenis fitur diantaranya yaitu tentang pemilihan menu jenis surat yang akan diajukan.
4	Security (Keamanan)	Sistem tidak mudah diakses sembarang orang	Sistem dilengkapi fitur login dan register untuk user yang benar benar ingin menggunakan sistem tersebut jika ingin mengajukan surat.

c. Use Case Diagram

Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan “bagaimana”. Sebuah use case diagram merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem(Zufria, 2013). Menurut pakar lain, Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan atau behavior sistem yang dibuat(Yuni, 2013)

Berikut merupakan bentuk analisis dari sistem pelayanan administrasi kependudukan pada Desa Jatitujuh dalam bentuk use case diagram.



Gambar 1. Use Case Diagram

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sistem pelayanan administrasi kependudukan berbasis web di Desa Jatitujuh menggunakan metode First In First Out (FIFO) dapat disimpulkan bahwa nantinya masyarakat yang akan melakukan proses pengajuan bisa melakukan pengajuan secara online tanpa harus datang ke rumah RT terlebih dahulu untuk meminta surat pengantar, sehingga proses pengajuan akan diproses berdasarkan waktu, agar lebih efisien. FIFO juga sangat

memudahkan dan mempercepat bagi aparat desa dalam pembuatan surat dan laporan bulanan, dikarenakan pembuatan surat dan laporan bulanan sudah dibuatkan oleh sistem secara otomatisasi.

REFERENCES

- Cristianingsih, E. (2018). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2), 1–14. <http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/329>
- Goenawan, & Susantolic, A. (2015). Pengaruh Metode Penilaian Persediaan terhadap Penentuan Harga Pokok Penjualan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 165–176.
- Hukum, F., & Suryadarma, U. (2018). Pemerintahan desa. 7(1), 82–95.
- Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Indonesia).
- Yuni, S. (2013). Analisis dan Perancangan UML (Unified Modeling Language) Generated VB.6. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Zufria, I. (2013). Pemodelan Berbasis UML (Unified Modeling Language) dengan Strategi Teknik Orientasi Objek User Centered Design (UCD) dalam Sistem Administrasi Pendidikan. *Journal Sains & Teknologi*, 1(1), 1–16.